

RILIS¹**“Politik Anggaran dalam RAPBN 2019, Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi Tahun 2018”***Oleh: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran*

Terkait dengan rancangan APBN 2019, FITRA memberikan masukan dan evaluasi atas beberapa titik kritis; *pertama*, pendapatan negara dan pajak, *kedua*, belanja negara dan hutang, dan *ketiga* evaluasi atas paket kebijakan ekonomi I-VII tahun 2018.

I. PENDAPATAN NEGARA/PAJAK**a. Pendapatan Negara**

Pada tahun 2018, realisasi pendapatan negara per juli 2018 sebesar Rp 994,36 triliun atau mencapai 52,48 persen dari target (APBN) sebesar 1.894,7 triliun. Atas hal tersebut Dirjen pajak patut kerja keras mengingat akhir tahun tinggal beberapa bulan lagi. Jika pada tahun 2017 realisasi pendapatan negara bisa mencapai Rp 1.655,8 triliun atau 95,4 persen, diharapkan di tahun 2018 pemerintah juga bisa merealisasikan pendapatan negara kurang lebih sama atau lebih besar dari tahun 2017.

Dalam RAPBN 2019 pemerintah menetapkan pendapatan negara sekitar Rp. 2.142 Triliun, target tersebut diklaim lebih realistis. Meskipun demikian FITRA menilai perlu adanya komitmen yang tinggi agar target di tahun 2019 tidak melenceng, mengingat kenaikan pendapatan negara mencapai 9,1 persen dari tahun 2018.

No	Keterangan	Outlook 2017	Outlook 2018	% Kenaikan 2018	RAPBN 2019	% Kenaikan 2019
	Pendapatan Negara	1.736.060,10	1.903.026,50	8,8%	2.142.524,10	11,2%
I	Pendapatan Dalam Negeri	1.732.952,00	1.897.643,30	8,7%	2.142.088,80	11,4%
a	Pajak	1.472.709,90	1.548.485,00	4,9%	1.780.995,90	13,1%
b	PBNP	260.242,20	349.158,30	25,5%	361.092,90	3,3%
II	Hibah	3.108,10	5.383,20	42,3%	435,3	-1136,7%

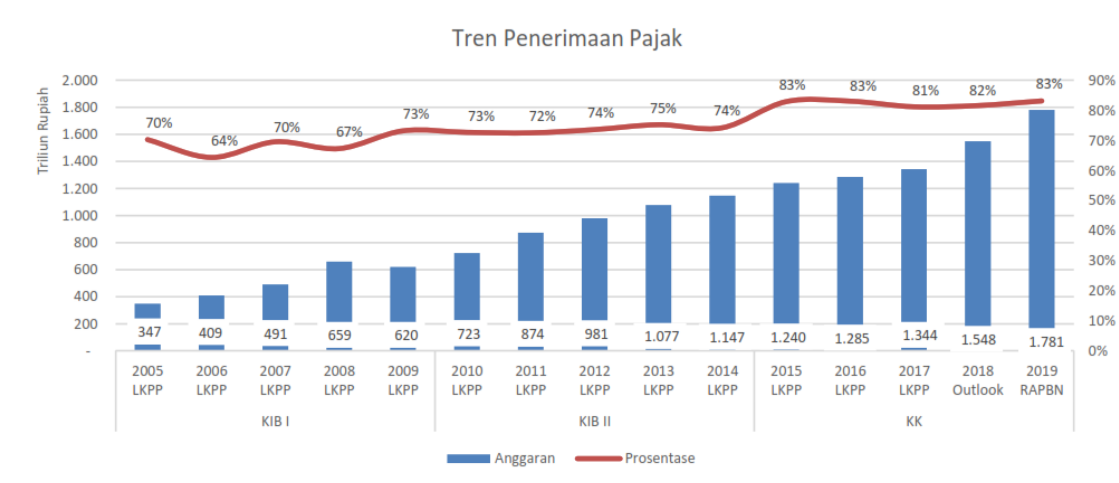
Sumber: Data olah Fitra tahun 2018, (dalam miliar Rupiah).

Belajar dari tahun 2016 dimana pendapatan negara hanya sebesar Rp 1.551,8 triliun atau 86,9 persen dari target dalam APBN-P 2016. Melesetnya target pajak pada tahun 2016 dikarenakan penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) yang rendah yaitu sebesar Rp 1.283,6 triliun atau 83,4 persen dari target APBN. Berhadap di tahun 2018 ini suntikan kebijakan dari paket ekonomi, data *tax amnesty*, dan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* bisa mendongkrak pendapatan negara baik di tahun 2019. Apa lagi pekerjaan rumah terbesar dari dirjen pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

¹ Dipaparkan dalam konpers bersama koalisi RAPBN 2019 (PYWP.)

b. Kontribusi Tax Amnesty Belum Maksimal

Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Negara & Hibah pada era Kabinet Kerja rata-rata mencapai 82 persen. Hal ini jauh melampaui penerimaan pajak pada era Kabinet Indonesia Bersatu I (KIB I) yang rata-rata hanya mencapai 69 persen dan KIB II mencapai 74 persen. Pada RAPBN 2019, Pendapatan Negara dan Hibah diproyeksi mencapai Rp 2.142 Triliun, dimana 83 persennya disumbang dari sektor perpajakan. Tingginya penerimaan pajak tidak lepas dari program *tax amnesty* dan *tax holiday* Pemerintah saat ini.



Sumber : LKPP APBN 2005 – 2017, Outlook APBN 2018, dan RAPBN 2019, diolah oleh FITRA

Tax Amnesty belum mampu menysar tujuan sebagaimana tertuan dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, antara lain mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak pada memperkuat nilai tukar rupiah, namun realisasinya nilai tukar rupiah makin melemah pasca pelaksanaan program *Tax Amnesty*.

Tax Amnesty belum mampu secara maksimal meningkatkan partisipasi Wajib Pajak, Total peserta *tax amnesty* sebanyak 965.983 WP atau hanya 2,95 persen dari WP terdaftar di tahun 2016. Secara jangka pendek, *Tax Amnesty* masih belum mampu menjadi solusi penerimaan negara namun secara jangka panjang melalui deklarasi harta kekayaan senilai Rp 4.800 Triliun dapat menjadi modal awal yang baik.

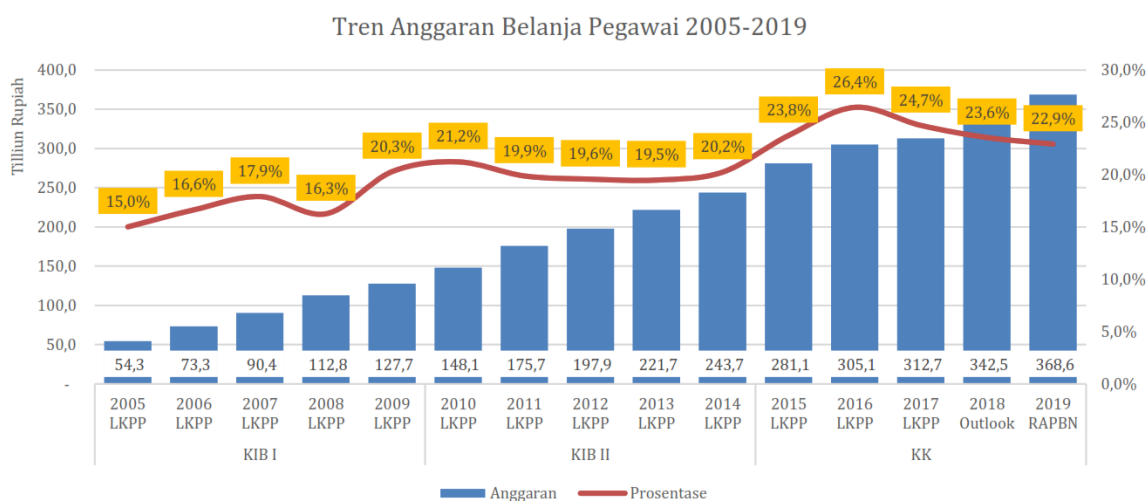
II. BELANJA NEGARA & HUTANG

a. Belanja Negara: Anggaran Belanja Pegawai Sarat Pencitraan

Pada tahun 2018 belanja negara mengalami kenaikan sebesar 5,3 persen, dan dalam RAPBN 2019 belanja negara juga mengalami kenaikan mencapai 9,1 persen dari *outlook* 2018. Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2019 terdapat 7 prioritas belanja pemerintah pusat, salah satunya adalah belanja untuk mendukung pemantapan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara. Berdasarkan hemat FITRA, belanja ini sarat dengan kepetingan, meningkatnya belanja aparatur menjelang tahun politik dirasa sangat populis.

No	Keterangan	Outlook 2017	Outlook 2018	% Kenaikan 2018	RAPBN 2019	% Kenaikan 2019
	Belanja Negara	2.098.940,60	2.217.252,50	5,3%	2.439.687,50	9,1%
I	Belanja Pemerintah Pusat	1.343.073,70	1.453.630,20	7,6%	1.607.340,00	9,6%
a	Kementerian Negara/ Lembaga	769.208,00	813.476,70	5,4%	840.284,00	3,2%
b	Non-Kementerian Negara/ Lembaga	573.865,60	640.153,50	10,4%	767.056,00	16,5%
II	Transper Daerah dan Dana Desa	755.867,00	763.622,30	1,0%	832.347,50	8,3%
a	Transfer Daerah	697.667,00	703.622,30	0,8%	759.347,50	7,3%
b	Dana Desa	58.200,00	60.000,00	3,0%	73.000,00	17,8%

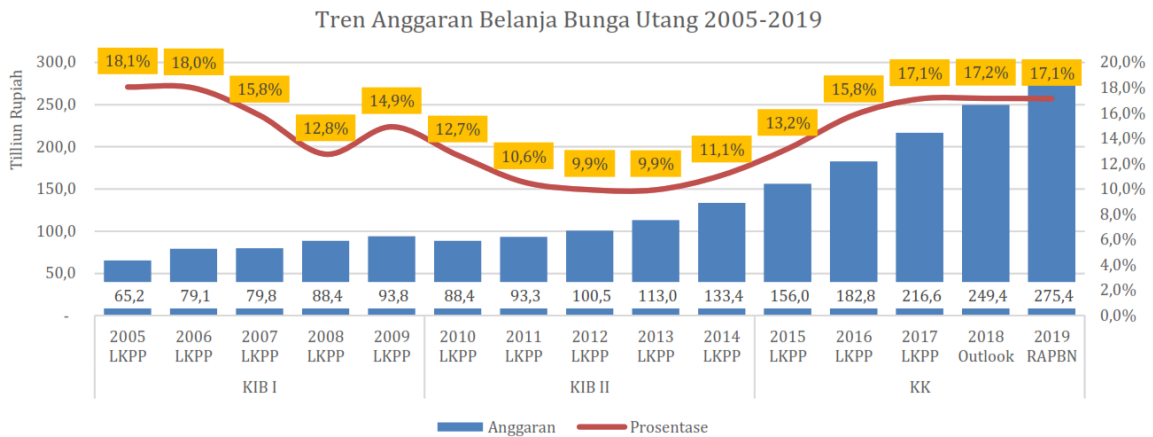
Pada RAPBN 2019, Anggaran Belanja Pegawai ditetapkan mencapai Rp 368,6 Triliun atau naik sekitar Rp 26,1 Triliun dibanding tahun 2018. Secara rata-rata, Belanja Pegawai di era Kabinet Kerja mencapai 24 persen dari Total APBN. Meski Jokowi baru dua kali menaikkan Gaji Pegawai selama periode pemerintahannya, persentase Belanja Pegawai-nya jauh di atas era Kabinet Indonesia Bersatu I (KIB I) dan KIB II yang rata-rata mencapai 17 persen dan 20 persen.



Sumber : LKPP APBN 2005 – 2017, Outlook APBN 2018, dan RAPBN 2019, diolah oleh FITRA

b. Hutang: Gali Lubang Tutup Lubang

Dalam acara Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun 2019 akan menjadi tahun yang berat bagi keuangan negara karena banyak hutang-hutang di masa lalu yang akan jatuh tempo. Di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2019 disebutkan bahwa total pembayaran Bunga Hutang pada tahun 2019 adalah sebesar 275.420,4 triliun atau sebesar 17,1 persen dari total Belanja Negara. Angka ini lebih tinggi dibanding Belanja untuk fungsi Pendidikan yang rata-rata hanya 11 persen dan Kesehatan yang hanya 4 persen. (rata-rata dalam 5 tahun).



Sumber : LKPP APBN 2005 – 2017, Outlook APBN 2018, dan RAPBN 2019, diolah oleh FITRA

Dari waktu-ke waktu, utang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mengatasi kekurangan sumber-sumber pembiayaan negara. Pada tahun 2019 diperkirakan pembiayaan negara yang bersumber dari utang sebesar 259.279,1 triliun atau sebesar 15% dari total Belanja Negara.

III. EVALUASI ATAS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI I-VII

Secara umum, paket kebijakan ekonomi Jokowi belum efektif, misalnya:

- a. Paket kebijakan ekonomi I, dalam menuntaskan proyek strategis nasional, pemerintah saat ini terbentur tingginya beban utang luar negeri & bunga utang.
- b. Pada paket kebijakan ekonomi II, *tax allowance* & *tax holiday* belum mampu mendongkrak PMDM & PMA. Realisasi investasi dunia ke Indonesia masih rendah hanya 1,97% dengan rata-rata pertahun US\$ 1.417,58 milyar.
- c. Pada paket kebijakan ekonomi III, pemerintah gagal menurunkan tarif listrik, harga BBM, dan gas. Kenaikan tarif listrik ini yang saat ini dampaknya paling dirasakan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah bawah. Sedangkan berdasarkan termuan BPK, nilai biaya pokok penyediaan tenaga listrik untuk sebagian golongan tarif non-subsidi tahun 2017 lebih tinggi dari tarif jualnya dan membebani PT PLN senilai Rp 7,46 triliun pada tahun 2017.
- d. Keberhasilan ada pada paket kebijakan ekonomi IV, pemerintah mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja menjadi 133,94 juta pada Feb 2018, naik 2,39 juta orang, dibanding Feb 2017; tingkat partisipasi angkatan kerja 69,20%, meningkat 0,18 point. Pengangguran juga berkurang sebesar 140 ribu orang, sejalan Tingkat Pengangguran Terbuka yang turun 5,13% pada Feb 2018.
- e. Pada paket kebijakan ekonomi V & VI juga belum berjalan optimal. Revaluasi aset untuk BUMN dan insentif untuk KEK terdampak, bahkan terindikasi mandek.
- f. Paket ke VII belum berjalan maksimal, makanya pemerintah sampai mengeluarkan paket kebijakan ekonomi ke XVI untuk kemudahan izin investasi. Peringkat kemudahan berusaha naik dari posisi 105 (2015) menjadi 72 (2017). Namun rasio investasi tersebut masih di bawah target RPJMN 38,9% pada 2019.

REKOMENDASI

1. Pemerintah harus mendorong transparansi informasi di bidang perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara.
2. Pemerintah harus konsisten dengan tujuan awal diberlakukannya Tax Amnesty, jangan hanya puas dengan penerimaan pajak dalam negeri.
3. Kenaikan Gaji Pegawai pada akhir periode terkesan sebagai upaya pencitraan di tahun politik. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Reformasi Birokrasi di Indonesia.
4. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui Utang Luar Negeri untuk. Alokasi anggaran perlu dialihkan untuk program-program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang dapat di-cover rupiah murni.
5. Paket Ekonomi paket kebijakan ekonomi jokowi belum efektif, diharapkan paket kebijakan ekonomi Jokowi juga harus sesuai dengan prioritas untuk meningkatkan pendapatan negara dan keamanan berinvestasi.

Kontak Person :

Misbah Hasan (Sekjen FITRA) 0822 1171 3249

Gurnadi Ridwan (Riset & Advokasi) 08567174713

Gulfino (Riset & Advokasi) 0895-3865-86940